



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

ANTISIPASI TREN RESTRIKSI PANGAN

Sri Nurhayati Qodriyatun

Peneliti Madya
sri.qodriyatun@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia sudah berhasil pulih. Namun, masih banyak ancaman global yang mengintai, salah satunya adalah terus melonjaknya harga komoditas pangan global. Tren terus naiknya harga komoditas pangan tersebut akan berdampak langsung pada naiknya harga komoditas pangan di dalam negeri.

Berdasarkan hasil penelitian *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS), naiknya harga komoditas pangan di dalam negeri terjadi karena adanya restriksi pangan global. Restriksi pangan pembatasan ekspor komoditas pangan dari negara produsen terus mengalami kenaikan. Kian marak di tengah ancaman kenaikan inflasi pangan global. Berdasarkan hasil kajian lembaga riset *Fitch Solutions*, sekitar 30 negara telah membatasi ekspor komoditas pangan sejak perang Rusia-Ukraina. Upaya tersebut sebagai bentuk proteksionisme pertanian pada tingkat tertinggi sejak krisis harga pangan pada tahun 2007-2008. Diperkirakan kondisi ini akan terus berlanjut beberapa bulan ke depan sehingga akan memperburuk ketahanan pangan negara-negara yang rentan di dunia.

Setiap negara mempunyai alasan tersendiri melakukan restriksi pangan. Anomali cuaca, perlindungan petani dan konsumen, perang, serta upaya memerangi kartel menjadi alasan utama memproteksi komoditi pangan masing-masing negara. Seperti yang dilakukan India dengan membatasi ekspor gandum dan gula per 1 Juni-31 Oktober 2022 untuk memastikan ketersediaan stok dan mengendalikan harga pangan menyusul gelombang panas yang menerpa negara tersebut. Namun, India tetap membuka ekspor kedua komoditas tersebut ke sejumlah negara rentan.

Kemudian, Malaysia per 1 juni 2022 juga menghentikan ekspor 3,6 juta ayam selama sebulan untuk mengatasi kekurangan stok dan kenaikan harga daging ayam di dalam negeri akibat cuaca, kenaikan harga pakan, dan diduga adanya kartel. Serbia dan Kazakhstan memberlakukan kuota ekspor biji-bijian untuk menjaga stok di dalam negerinya. Argentina melarang ekspor daging sapi sejak Mei 2022 untuk meredam lonjakan inflasi yang mencapai 50,9% pada 2021. Rusia membatasi ekspor gandum, pupuk, dan menangguhkan ekspor gula. Selain itu, Rusia juga melarang ekspor biji bunga matahari dan memberlakukan kuota ekspor minyak bunga matahari per April-Agustus 2022 untuk mengurangi kenaikan harga domestik. Indonesia pun pernah melarang ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan sejumlah produk turunannya per 28 April-23 Mei 2022 untuk memastikan ketersediaan stok dan mengendalikan harga minyak goreng di dalam negeri.

Tingginya harga komoditi pangan dalam negeri, menurut CSIS tidak hanya karena adanya tren restriksi pangan global. Akan tetapi, juga karena dipicu adanya pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Efek dari krisis Covid-19, *rebound* harga komoditas pangan pada saat krisis Covid-19 lebih cepat dibandingkan krisis sebelumnya. Faktor penyebab lainnya adalah efek dari perubahan iklim. Perubahan iklim menambah tekanan pada ketersediaan pangan secara global. Iklim ekstrim yang muncul sebagai dampak perubahan iklim menyebabkan produksi hasil pertanian menurun dan tidak bisa memenuhi permintaan yang ada.

Meningkatnya tren restriksi pangan yang dilakukan banyak negara di tengah perubahan iklim dan pandemi Covid-19 yang belum juga berhenti, tentunya perlu diantisipasi pemerintah, mengingat beberapa komoditas pangan nasional masih tergantung pada impor. Upaya perbaikan tata kelola kebijakan pangan dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan menjadi sangat diperlukan.

Atensi DPR

Pangan merupakan kebutuhan pokok masyarakat, terus meningkatnya harga pangan akan berpengaruh langsung pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, DPR RI khususnya Komisi IV perlu mendorong pemerintah untuk mengantisipasi tren kenaikan restriksi ini, mengingat beberapa komoditas pangan masih bergantung pada pasokan impor. Koordinasi antara Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian sangat diperlukan untuk memperhitungkan ketersediaan dan stok pangan. Ratifikasi perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Kawasan atau *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) mendesak dilakukan untuk meredam gejolak harga dan ancaman terhadap rantai pasok global, yang salah satunya diakibatkan perang Rusia-Ukraina.

Selain itu perlu ada upaya optimalisasi potensi produksi komoditas pangan dalam negeri untuk menekan kelangkaan komoditas impor dan memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Kemandirian pangan menjadi hal utama diupayakan untuk mengatasi naiknya tren restriksi pangan global. Untuk itu, reformasi tata kelola kebijakan pangan juga perlu dilakukan. Untuk jangka panjang, pemerintah perlu melakukan inovasi dan percepatan adopsi teknologi untuk petani dan pekebun untuk meningkatkan produksi pertanian dalam negeri.

DPR RI juga perlu mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, berupa subsidi atau bantuan langsung kepada masyarakat. Untuk menutupi beban subsidi atau bantuan tersebut, maka pemerintah perlu menambah pajak ekspor untuk komoditas pangan yang sedang melambung agar subsidi atau bantuan langsung tersebut tidak membebani fiskal negara.

Sumber

antaranews.com, 1 Juni 2022;
bisnis.com, 29 Mei 2022;
Kompas, 30 Mei 2022;
kontan.co.id, 1 Juni 2022;
Republika, 30 Mei 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S
Sri Nurhayati Q
Sulasi Rongiyati
Izzaty

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022